



RENCANA STRATEGIS

POLITEKNIK KP BITUNG

TAHUN 2025-2029



Politeknik KP Bitung



www.poltekkp-bitung.ac.id/



Politeknik KP Bitung



politeknikp_bitung@yahoo.com



TIM PENYUSUN
RENSTRA POLITEKNIK KP BITUNG
TAHUN 2025 – 2029

1. Penanggung Jawab : IGP Gede Rumayasa Yudana, M.P (Direktur)
2. Ketua : Dr. Barokah (Koordinator BAB III)
3. Wakil Ketua : 1. Dr. Rudi Saranga (Koordinator BAB II)
2. Saeful A. Tauladani, M.Si (Koordinator BAB I)
4. PPK : Novie Wijaya, M.ST.Pi (Koordinator BAB IV)
5. Sekretaris : Koordinator BAB I : Ahmad Tubagus T.R. Aji, S.Tr.Pi
Koordinator BAB II : Grandhi K. Da Gomez, M.Tr.Pi
Koordinator BAB III : Karyanto, M.Si
Koordinator BAB IV : Feronica Umboh, S.E
6. Anggota : BAB I : 1. I Nyoman Subawa, S.Pi
2. Fahriadi Pakaya, M.T
3. Dessy Atika Natalia, M.Tr.Pi
4. Wasum, M.T
5. Fitroh Dwi A. Hariyoto, M.Si
6. Gregorio A. Tumewu
BAB II : 1. Lusje S. Mawuntu, S.E
2. Lidya Katili, M.Si
3. Yurika Nantan, M.T
4. Temi S. Kaligis, A.Md
5. Grace Kristi Irjayanti, S.E
6. Fernando Wowiling, M.Si
7. I Nyoman Andi Wiguna, A.Md.Pi
BAB III : 1. Yunita Undap, S.Sos
2. Dyah Ayu Rakhmayeni, M.Tr.Pi
3. Elsari Tanjung Putri, M.Eng
4. Ahmad Ilham Ramadhani, M.T
5. Lexi Hosang, S.T
6. Mohamad Akbar, M.Si



- BAB IV : 1. Hafsah Paputungan, S.E
2. Meilya Suzan T., M.T
3. Iin Fridayani Veronika Purba, A.Md
4. Saiful, A.Md
5. Septyan V. Makanoneng, A.Md.Pi
6. Fitri Londo, S.E
7. Tenaga Ahli : BAB I : 1. Raman G.T.H Simanjuntak, M.Si
2. Heru Santoso, M.Si
- BAB II : 1. Kaminton Tambunan, M.Si
2. Josua CH. Huwae, M.Si
- BAB III : 1. Jenny Manengkey, M.Si
2. Nova Tuamnduk, M.Si
3. Hetty M.P. Ondang, M.Si
- BAB IV : 1. Itje D. Mawengkang, M.Si
2. Fidel Ticoalu, M.Si
3. Lusje Lidya D. Antou, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga terselesaikannya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Keberadaan dokumen Renstra akan menjadikan panduan arah pengembangan ke depan, kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi setiap tahunnya sampai kepada pengawasan dan evaluasi kegiatan guna memperbaiki kinerja ke depan dan mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang telah mempercayakan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peserta didik di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Sulawesi utara. Terima kasih yang luar biasa juga kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun Renstra 2025-2029 serta Sivitas Akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Bitung, April 2025

Direktur,

IGP Gede Rumayasa Yudana



RANGKUMAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk membuat dokumen dasar sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen pendidikan lainnya. Dokumen ini berusaha memaparkan seluruh aspek strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang menjadi dasar perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Sistematika penyajian Rencana Strategis secara garis besar adalah :

1. Pendahuluan: memuat latar belakang, tujuan, pengertian dan ruang lingkup, konsepsi dasar dan metodologi penyusunan Rencana Strategi.
2. Profil Organisasi: memuat gambaran umum organisasi dan isu-isu strategis yang sedang dihadapi.
3. Kinerja Tahun Berjalan: menjelaskan tentang kinerja di bidang pelayanan, keuangan, administrasi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.
4. Arah Bisnis Organisasi: berisi Nilai, Visi, Misi, Tujuan, Fungsi, Sasaran strategi pengembangan dan kerangka pembiayaan.
5. Penutup.



DAFTAR ISI

Halaman

TIM PENYUSUN RENSTRA POLITEKNIK KP BITUNG	
TAHUN 2025 – 2029.....	i
KATA PENGANTAR	iii
RANGKUMAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Umum	3
C. Potensi dan Permasalahan	6
D. Tujuan.....	9
E. Konsepsi Dasar.....	9
F. Landasan.....	10
G. Metode.....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN STRATEGIS.....	12
A. Visi Misi Pemerintah Indonesia.	12
B. Visi Misi Indonesia Emas 2045	12
C. Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan	13
D. Tujuan.....	15
E. Fungsi	15
F. Sasaran Strategis	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	22
A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional.....	22
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan	29
C. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	34
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48



A. Indikator Kinerja	48
B. Pendanaan.....	50
BAB V PENUTUP.....	51



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Poltek KP Bitung Tahun 2025-2029	19
Tabel 2. Perkembangan Tenaga Pengajar	36
Tabel 3. Perkembangan Kualifikasi SDM Pengajar	37
Tabel 4. Tenaga Kependidikan Politeknik KP Bitung	37
Tabel 5. Data Prasarana Politeknik KP Bitung	38
Tabel 6. Daftar Kerja Sama Politeknik KP Bitung Dengan Pihak Lain	39
Tabel 7. Daftar Jumlah Alumni.....	42
Tabel 8. Capaian Layanan Pelatihan Politeknik KP Bitung	45
Tabel 9. Layanan Uji Kompetensi Politeknik KP Bitung 2016-2018.....	46
Tabel 10. Akreditasi Program Studi Politeknik KP Bitung	47
Tabel 11. Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029	48



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Konsepsi Dasar Penyusunan Rencana Strategis.....	10
Gambar 2. Peta Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung	17



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berawal dari keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, agar di daerah ini dapat didirikan Perguruan Tinggi Kedinasan dalam bentuk Akademi Perikanan, sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 050/BAPEDA/1995 tanggal 25 Desember 1995 yang diajukan kepada Menteri Pertanian u.p Dirjen Perikanan Departemen Pertanian.

Keinginan Pemda Tingkat I dimaksud ditangani serius oleh SPP Negeri Bitung yang merupakan salah satu UPT milik Departemen Pertanian yang berorientasi perikanan laut. Berdasarkan Surat Nomor: DL210/38/III/1996; tanggal 14 Maret 1996 mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Utara kiranya SPP Negeri Bitung dapat ditingkatkan menjadi Akademi Perikanan Bitung dikarenakan telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu sarana dan prasarana sudah ada dan siap untuk dimanfaatkan.

Setelah perjalanan panjang yang dilalui, akhirnya melalui SK. Mendikbud Nomor: 50076/MPK/PP/99 tanggal 5 September 1999 perihal Persetujuan Pendirian Akademi Perikanan Bitung terbit dan mulai operasional kegiatan pada tahun akademik 1998/1999 dengan jumlah peserta didik 85 orang melalui peresmian yang dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara Bapak E.E. Mangindaan pada tanggal 2 September 1998. Selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 54/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perikanan Bitung dilanjutkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 55/PERMEN-KP/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan serta yang terakhir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor: 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.

Pembentukan Politeknik KP Bitung merupakan upaya dalam memajukan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang selaras dengan pengembangan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang di mana



menjadikan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang kreatif, inovatif, unggul, dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, SDM kompeten memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. SDM Kelautan dan Perikanan harus dibekali dengan pengetahuan yang terbaru. Hal tersebut semakin relevan maknanya di tengah derasnya arus globalisasi yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang diyakini akan dipengaruhi oleh beragam tata nilai baru sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (*society*) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (*human-centered*) serta berbasis teknologi (*technology based*). *Cyber-physical system* (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara physical system, komputasi dan juga *network/komunikasi*, sedangkan *society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi *cyber – physical– human systems*.

Renstra Politeknik KP Bitung Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan Politeknik KP Bitung merupakan turunan rencana strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang juga merupakan turunan dari visi BPPSDM KP dan KKP. Keberadaan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kelautan dan perikanan untuk menyediakan tenaga profesional bidang kelautan dan perikanan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha, diselenggarakan melalui pendekatan *teaching factory*;
2. Melaksanakan penelitian yang inovatif terapan yang bermanfaat bagi dunia industri dan dunia usaha bidang kelautan dan perikanan;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi penerapan ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan dalam membangun daerah dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



4. Menjalin hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri serta pelaku usaha perikanan untuk mewujudkan perikanan mandiri yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan manajemen dan tata kelola berdasarkan sistem penjamin mutu yang terstandar.

B. Kondisi Umum

B.1. Kinerja Politeknik KP Bitung Tahun 2020 - 2024

Kondisi umum kelautan dan perikanan perlu mendapatkan perhatian untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam membangun kelautan dan perikanan ke depan, yaitu keberlanjutan sumber daya alam di laut khususnya sumber daya ikan, dukungan SDM Handal, infrastruktur, dan sistem kelembagaan.

Sumber daya manusia unggul menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan, karena itu sudah saatnya Indonesia memiliki *grand design* pembangunan kelautan dan perikanan yang berpihak pada pengembangan SDM Indonesia di masa yang akan datang. Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan) *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-enviroment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) selaras dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai turunan dari arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu bentuk keterlibatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya melalui UPT Politeknik KP Bitung adalah : Pengembangan SDM yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan penyuluhan;

1. Mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan magang di dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman praktis yang relevan.



2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

B.2. Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020 - 2024

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan empat pilar pembangunan, yaitu *pro-poor* (pengentasan kemiskinan) *pro-job* (penyerapan tenaga kerja), *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-environment* (pemulihan dan pelestarian lingkungan) selaras dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai turunan dari arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, salah satu bentuk keterlibatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Melalui Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, UPT Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yaitu:

1. Pengembangan SDM yang kompeten di bidang kelautan dan perikanan melalui pendidikan vokasi, pendampingan, dan sertifikasi;
2. Mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan magang di dunia usaha dan industri kelautan dan perikanan, sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman praktis yang relevan.
3. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat perikanan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam periode 2020 - 2024 beberapa capaian indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik pada tahun 2020 di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebanyak 50,32% (77 orang dari 137 orang).
2. Jumlah peserta didik yang kompeten di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung pada tahun 2021 sebanyak 464 orang dari target 459 orang.
3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang meningkat kompetensinya pada tahun 2022 sebanyak 20 orang dari target 12 orang.
4. Persentase lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung pada tahun 2023 yang bekerja di bidang Kelautan dan Perikanan sebanyak 77,86% dari target 75%.



Pada tahun 2024 Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah mendapatkan prestasi sebagai Unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilingkungan KKP periode penilaian Tahun 2023 sampai dengan September Tahun 2024.

B.3. Dukungan Terhadap Isu-isu Strategis

Politeknik KP Bitung memiliki peran untuk mendorong peningkatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pendidikan kelautan dan perikanan untuk peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Keberadaan Politeknik KP Bitung ikut serta dalam merespons isu strategis pemerintah dan telah berkontribusi antara lain:

1. Penurunan angka kemiskinan melalui program penerimaan taruna yang 100% berasal dari masyarakat/pelaku perikanan dan kelautan sebagai upaya peningkatan pembangunan disektor perikanan dan kelautan dengan sumber daya manusia yang kompeten;
2. Peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung industri melalui program *teaching factory* yang merupakan program pembelajaran yang mengacu kepada standar dan prosedur yang berlaku di industri sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri;
3. Peningkatan perekonomian melalui program kewirausahaan dan sebagai upaya menumbuhkan jiwa wirausaha bagi taruna/i sehingga diharapkan akan dapat menyerap banyak tenaga kerja;
4. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi taruna berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna sesuai dengan perkembangan zaman;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui program pengabdian kepada masyarakat guna mendukung program prioritas KKP dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan pengetahuan/teknologi demi kemajuan masyarakat;
6. Program penelitian vokasional yang berorientasi dalam mendukung perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.



C. Potensi dan Permasalahan

C.1. Potensi

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²). Secara geopolitik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai “poros maritim” dunia dalam konteks perdagangan global (*the global supply chain system*) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan Mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), jasa-jasa kelautan, dan sumber keragaman hayati lainnya.

Potensi Kelautan dan Perikanan, sebagaimana Kota Bitung adalah berada pada provinsi Sulawesi Utara yang tepat berada di bibir Samudera Pasifik merupakan salah satu pintu bagi Indonesia dalam pengembangan sektor perikanan dan perdagangan internasional.

C.2. Permasalahan

Dalam lima tahun mendatang (2025 – 2029), arah kebijakan utama pemerintah adalah pemberdayaan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Lebih spesifik, RPJMN 2025-2029 bertujuan untuk mencapai target "Indonesia Emas 2045" dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di wilayah pesisir Indonesia lebih besar dibandingkan dengan wilayah non-pesisir. Wilayah pesisir memiliki 17,74 juta orang miskin, yang menyumbang 68% dari total kemiskinan di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan tentang kondisi sebagian pelaku usaha perikanan Indonesia yang masih tergolong miskin merupakan persoalan kompleks dan bersifat



multidimensional sehingga membutuhkan pendekatan komprehensif untuk menyelesaikannya.

Selain masalah tersebut di atas, isu nasional terkait *illegal fishing*, kerusakan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak berkelanjutan akan menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Dalam menyikapi dan mencari solusi penanggulangannya, maka Politeknik KP Bitung mengambil peran melalui kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, dan keterlibatan secara langsung pada kegiatan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) untuk membantu mengurai permasalahan isu nasional tersebut guna meningkatkan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan itu sendiri.

Lebih spesifik lagi permasalahan pada sektor SDM perikanan terkait dengan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dalam dunia usaha dan dunia industri, sebagai bentuk kesiapan penyelenggaraan pendidikan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mencetak SDM yang siap pakai dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

C.3. Lingkup Strategis

Michael Todaro (1997) menyatakan bahwa modal lingkungan (*enviromental capital*) sebagai salah satu modal penting bagi keberhasilan pencapaian misi organisasi. Demikian pula Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk memetakan lingkungan strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan (SWOT, *strenght-weakness-opportunities-threats*).

Pada konteks pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan strategi eksternal yang berpengaruh secara langsung yakni : Pendapatan per kapita masyarakat, sarana dan prasarana fasilitas umum, kondisi sosial dan budaya masyarakat, tingkat keamanan, dan kinerja aparat pemerintahan.

Sedangkan lingkungan strategis perikanan internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan yakni: *pertama*, aspek ekonomi



yang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB. *Kedua*, aspek sosial dan politik yang berkaitan dengan konstelasi politik di tingkat nasional maupun daerah serta pembangunan wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam koridor UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah. *Ketiga*, kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, perpres, keppres, inpres, dan berbagai peraturan menteri kelautan dan perikanan yang berkenaan dengan bidang perikanan. *Keempat*, sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan daerah, terutama menyangkut sinergi dan dukungan lintas K/L terkait serta dinas kelautan dan perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota. *Kelima*, perkembangan iptek dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik perikanan yang sah sangat di perlukan sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok ikan di suatu wilayah pengelolaan perikan (WPP). *Keenam*, kapasitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumber daya manusia perikanan sebagai penentu keberhasilan kegiatan di sentra pengolahan berbasis produk perikanan. *Ketujuh*, sistem pengawasan, terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi terjaganya kelestarian sumber daya tersebut, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk pembangunan kelautan dan perikanan memiliki beberapa faktor strategis lingkungan internal, baik yang bersifat kekuatan maupun kelemahan, yakni (1) Sumber Daya Ikan, Habitat, dan Produksi; (2) pengelolaan perikanan nasional; (3) Geografi; (4) Kependudukan; (5) Ekonomi nasional; (6) Ideologi nasional; (7) Sosial-budaya nasional; (8) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan penegakan hukum; (9) Pertahanan dan keamanan nasional; (10) IPTEK dan informasi nasional; (11) ketersediaan bahan baku; (12) Konektivitas antar pulau; (13) manajemen industri (teknologi produksi, SDM, Pemasaran); (14) Permintaan hasil perikanan dalam perikanan dalam negeri; (15) pengelolaan sistem pembinaan mutu dan keamanan pangan.



Sedangkan identifikasi faktor strategis lingkungan eksternal menunjukkan empat aspek yang sama, yang dapat menjadi peluang ataupun ancaman dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni (1) permintaan hasil perikanan dunia; (2) sumber daya alam, praktik dan tingkat produksi perikanan dunia, (3) Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan regional dan dunia; (4) Kerja sama bilateral, regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO); (5) Praktik *illegal fishing* global; (6) sumber daya alam, praktik dan tingkat produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia; dan (7) Kependudukan dunia.

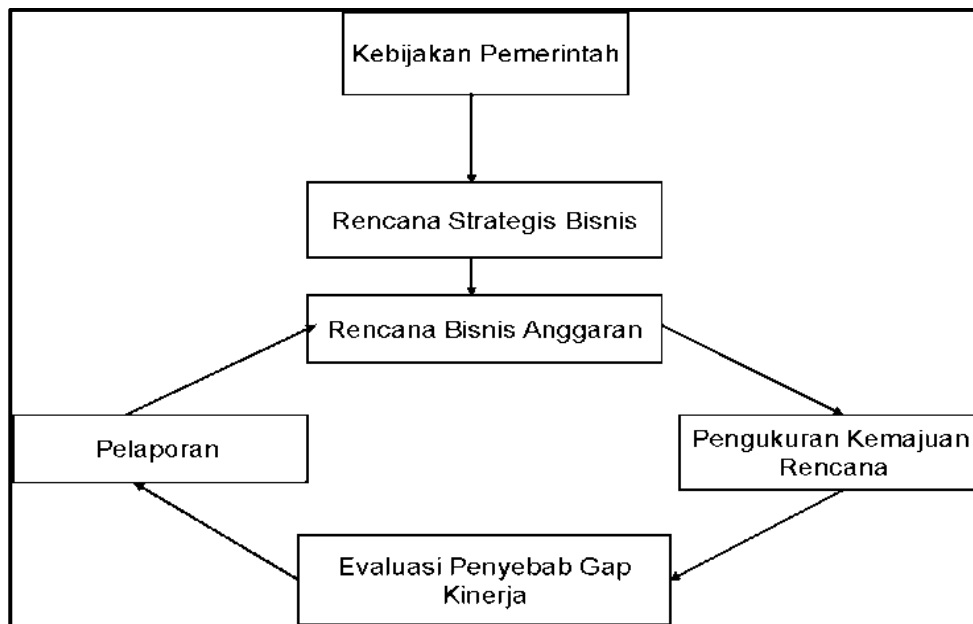
D. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung bertujuan:

1. Memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan penganggaran untuk terlaksananya kegiatan guna tercapainya visi dan misi;
2. Meningkatkan pelayanan secara internal untuk peningkatan fungsi tata kelola organisasi dan peningkatan layanan secara eksternal kepada pengguna layanan utamanya masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Memberikan kepastian terlaksananya tahapan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan melalui peningkatan SDM anak pelaku usaha perikanan.

E. Konsepsi Dasar

Pengelolaan keuangan dan non keuangan pada suatu entitas merupakan sebuah siklus yang terus berlangsung dalam organisasi. Siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi yang akan dijadikan umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Konsepsi Dasar penyusunan Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Konsepsi Dasar Penyusunan Rencana Strategis

F. Landasan

Penyusunan Rencana Strategis ini berdasarkan atas peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJM 2025-2029.

Sedangkan dokumen yang dijadikan referensi penyusunan Rencana Strategi adalah :

1. Pedoman Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tahun akademik 2024/2025;
2. Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 2025-2028.



G. Metode

Rencana Strategi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung disusun dengan metode dokumentasi, observasi dan *desktop analysis* yang dilakukan oleh Tim Penyusun. Tim tersebut terdiri dari seluruh komponen yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Seluruh isi materi Rencana Strategi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah profesional yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Misi Pemerintah Indonesia.

Visi Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode Tahun 2024 - 2029 adalah :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 (delapan) Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Visi Misi Indonesia Emas 2045

Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan



Visi ini berlandaskan pada: (i) Kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) Perkembangan megatrend global; (iii) Pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Berangkat dari visi yang ada, maka untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan, yang terdiri atas :

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kestinambungan Pembangunan.

C. Visi Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari kabinet kerja akan berkontribusi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan agenda pembangunan nasional, dan menjalankan program kementerian.

C.1. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai bagian dari Lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**.

C.2. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Misi KKP merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas,



fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan dijabarkan dari misi pembangunan nasional. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

C.3. Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Tahun 2040. Sebagai bagian dari UPT Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan yang membidangi pendidikan, maka Visi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menyesuaikan dengan Visi Pusat Pendidikan KP, Visi BPPSDM KP, dan Visi KKP. Visi Politeknik KP Bitung adalah :

“Mewujudkan Pendidikan SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Bermoral, Profesional, Inovatif, dan Unggul Untuk Menjadi Pusat Pendidikan Vokasi Kelautan Dan Perikanan Berdaya Saing Global Tahun 2040 Guna Mendukung Indonesia Emas Tahun 2045”.

C.4. Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Misi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi mengacu kepada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dan sebagai turunan dari penjabaran misi KKP. Misi Politeknik KP Bitung:



1. Mengembangkan reformasi pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dinamis, dan kompetitif, berstandar internasional sesuai regulasi yang berlaku guna mendukung SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
2. Penguatan riset terapan dan inovasi teknologi bidang kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
3. Mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik serta kependidikan sesuai perkembangan industri dan teknologi.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi modern dengan standar internasional.
6. Menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 serta membudayakan pelayanan prima.
7. Melaksanakan kebijakan dan tugas yang diamanatkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan serta Kepala BPPSDM KP.

D. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas kabinet kerja. Oleh karena itu, Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Politeknik ini berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing global melalui pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Selain itu, Politeknik KP Bitung mendorong inovasi dan penelitian terapan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor perikanan, mendukung pemberdayaan masyarakat pesisir, memperkuat kerja sama nasional dan internasional, serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berbasis mutu.

E. Fungsi

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91/PERMEN-KP/2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Politeknik KP Bitung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi di



bidang kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pembinaan Politeknik KP Bitung secara teknis akademik dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan dipimpin oleh Direktur.

Politeknik KP Bitung mempunyai fungsi menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas Politeknik KP Bitung menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan dibidang kelautan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- f. Pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. Pelaksanaan pembinaan karakter;
- h. Pembinaan civitas akademi dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. Pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- j. Pelaksanaan pengawasan internal
- k. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya; dan
- l. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Politeknik KP Bitung didukung oleh:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Dewan Penyantun;
- c. Senat;
- d. Satuan Penjaminan Mutu ;



- e. Satuan Pengawas Internal ;
- f. Subbagian Umum;
- g. Program Studi ;
- h. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- i. Pusat Pembinaan Karakter;
- j. Unit Penunjang; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dalam bidang kelautan dan perikanan, merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dalam mendukung tercapainya visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peta Strategis kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Peta Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

a. Internal Process Perspective (output)

Menjabarkan Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam Sasaran Kegiatan yakni terselenggaranya pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten; tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan, serta terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan; dengan indikator kinerja :



1. Jumlah lulusan pendidikan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri 126 orang pada tahun 2025 menjadi 153 orang pada tahun 2029.
2. Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung 148 orang pada tahun 2025 menjadi 170 orang pada tahun 2029.
3. Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang kompeten 495 orang tahun 2025 tetap sama sampai dengan tahun 2029.
4. Nilai PNBP satker Politeknik KP Bitung 0,474 Miliar pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
5. Kerja sama Politeknik KP Bitung yang disepakati 2 kesepakatan pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
6. Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi 100 % pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
7. Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bitung 100 % pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
8. Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung 3 paket pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
9. Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung 1 kelompok pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
10. Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bitung 1 lembaga pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
11. Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang tersertifikasi 35 orang pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.

b. *Learning and Growth Perspective (input)*

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung melalui Sasaran Kegiatan yakni tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dengan indikator kinerja:



1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung sebesar 85 % pada tahun 2025 tetap sama sampai dengan tahun 2029.
2. Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung dengan nilai 81 pada tahun 2025 menjadi nilai 83 pada tahun 2029.
3. Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung sebesar 84 pada tahun 2025 menjadi indeks 88 pada tahun 2029.
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung sebesar 80 % pada tahun 2025 menjadi 88 % pada tahun 2029.
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bitung sebesar 80 % pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung sebesar 92 pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung sebesar 71,5 pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.
8. Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bitung sebesar 100 % pada tahun 2025 dan tetap sama sampai dengan tahun 2029.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Poltek KP Bitung Tahun 2025-2029

Tabel 17. Indikator Kinerja Utama Porter KP Bitung Tahun 2025-2029							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2028	TAHUN 2029
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (INPUT)							
I	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	1 Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	126	153	127	129	153
		2 Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (Orang)	148	170	148	148	170



		3	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang kompeten (Orang)	495	495	495	495	495
		4	Nilai PNBP satker Politeknik KP Bitung (Rp. Miliar)	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
		5	Kerjasama Politeknik KP Bitung yang disepakati (Kesepakatan)	2	2	2	2	2
		6	Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang bersertifikasi kompetensi (%)	100	100	100	100	100
		7	Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bitung (%)	100	100	100	100	100
II	Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	8	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Paket)	3	3	3	3	3
		9	Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (kelompok)	1	1	1	1	1
III	Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	10	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bitung (Lembaga)	1	1	1	1	1
		11	Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang tersertifikasi (Orang)	35	35	35	35	35
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (INPUT)								



IV	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	85	85	85	85	85
		13	Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	81	81.5	82	82.5	83
		14	Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	84	85	86	87	88
		15	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	80	82	84	86	88
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bitung (%)	80	80	80	80	80
		17	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92	92	92	92	92
		18	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
		19	Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bitung (%)	100	100	100	100	100



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi merupakan langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang berdampak nyata terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan nasional dan agenda prioritas RPJMN 2025 - 2029.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

A.1. Strategi Pembangunan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029 strategi pembangunan nasional digariskan sebagai berikut :

1. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional.
2. RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
3. Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan, Menteri melakukan pembinaan SDM perencana.
4. Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan ditetapkan kementerian/lembaga koordinator dan kementerian/lembaga pengampu pada masing-masing prioritas nasional.
5. Kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat mengoordinasikan penyusunan kebijakan/program/kegiatan pada Renstra-KL dan rencana kerja kementerian/ lembaga yang berkontribusi terhadap prioritas nasional sesuai dengan lingkup prioritas yang menjadi kewenangannya.
6. RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan



- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-KL;
 - b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
 - c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
 - d. pedoman dasar dalam dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
 - e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional.
7. RPJM Nasional memuat proyek strategis nasional.
 8. RPJM Nasional wajib ditaati oleh seluruh pelaku pemerintah dengan melibatkan pelaku pembangunan nonpemerintah.

A.2. Visi Pemerintah Yang Merupakan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional

Visi : Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

A.3. Program atau Agenda Prioritas Pembangunan Nasional

Kerangka pencapaian tujuan RPJMN 2025 - 2029 dirumuskan lebih lanjut dalam 8 (Delapan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional - Asta Cita). Antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

A.3.1. Program Prioritas Pemerintah

Program prioritas pemerintah terdiri dari 17 program antara lain :

1. Swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.



Dalam rangka menindak lanjuti program pemerintah Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mengambil peran untuk menunjang pemerintah:

1. Mendukung swasembada pangan melalui pembentukan pengusaha perikanan yang terdidik;
2. Mendukung penerimaan negara dengan mengoptimalisasikan unit pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengimplementasikan Reformasi birokrasi yang efektif dan efisien,
4. Menggalakkan Pencegahan dan pemberantasan korupsi mulai dari unsur pimpinan, staf dan seluruh taruna.
5. Melaksanakan kegiatan pendidikan untuk memberantas kemiskinan berfokus pada pelaku perikanan.

Upaya lain dalam mendukung program pemerintah pusat, Politeknik KP Bitung juga mendukung program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebijakan Ekonomi Biru diimplementasikan dalam 5 program prioritas, yaitu:

1. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota;
2. Pembangunan Budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;
3. Perluasan kawasan konservasi laut;
4. Pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, dan;
5. Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Untuk percepatan pembangunan Politeknik KP Bitung perlu Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan layanan publik yang baik.

- a) Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas.
- b) Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunikasi dan media tradisional.
- c) Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.



- 1) Pengembangan Kawasan Perbatasan
 - a) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang andal serta pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) guna mengelola potensi lokal untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing.
 - b) Mengembangkan kawasan konservasi di pulau-pulau kecil terluar.
- 2) Pengembangan Daerah Tertinggal

Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal (pesisir, pulau-pulau kecil/terdepan/terluar) dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, potensi/posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek pengembangan SDM.
- 3) Pembangunan Pedesaan

Pembangunan sumber daya manusia, keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa pesisir dan masyarakat kelautan dan perikanan.
- 4) Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
 - a) Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Meningkatkan relevansi pendidikan kelautan dan perikanan dengan kebutuhan dunia kerja, melalui pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri.
 - b) Perbaikan Lingkungan Memperbaiki kualitas lingkungan masyarakat kelautan dan perikanan dengan upaya rehabilitasi, konservasi, pengendalian pencemaran, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.
- 5) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
 - a) Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi
 1. Meningkatkan hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek yang mendukung dalam keberlanjutan perikanan tangkap, pusat studi terumbu karang, pusat studi jasa kelautan
 2. Peningkatan dukungan iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati (*Bioresources*) melalui peningkatan kegiatan penelitian



3. Penyusunan *roadmap* RIPTEK KP (Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kelautan dan Perikanan)
4. Penguatan inovasi iptek kelautan dan perikanan melalui pengembangan kerja sama luar negeri dan kemitraan litbang antara Pemerintah-Perguruan Tinggi-Masyarakat-Swasta/Industri.
- b) Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Hasil Perikanan
 1. Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan, melalui: i) Penguatan pengendalian, pengawasan dan advokasi mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan standarisasi mutu dalam negeri (SNI) serta pengembangan dan penerapan sertifikasi *eco labelling* dan ketelusuran produk (*product traceability*), serta penanganan ikan yang baik (CPIB) dan penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI), ii) Pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; iii) Pengembangan inovasi riset dan intermediasi teknologi perikanan, iv) Peningkatan kemampuan daya saing industri pengolahan produk perikanan
 2. Penyempurnaan tata kelola perikanan, melalui : 1) pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan, peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan pendidikan Politeknik KP Bitung
 3. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan melalui : 1) Pungutan lembaga pengelola WPP, 2) Pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap, 3) Penguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan, 4) Partisipasi aktif di dalam organisasi perikanan dunia untuk menjaga kepentingan nasional.
- 6) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategi ekonomi domestik
 - a) Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produk Perikanan.
 1. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Usaha Perikanan untuk mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi, melalui : i) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan yang efisien dan ramah lingkungan; ii) pelatihan



dan penyuluhan terhadap pelaku utama/usaha KP dalam meningkatkan produktivitas usahanya.

2. Penguatan keamanan produk pangan perikanan, melalui : i) penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (*Good Handling Practices*) pada perikanan tangkap; ii) pengembangan produk perikanan berkualitas dan memenuhi standar *Hazard Analysis and Critical Control/HACCP* untuk menjamin keamanan produk dan mutu pangan olahan.

b) Kedaulatan energi.

1. Meningkatkan penggunaan energi yang ramah lingkungan untuk menggerakkan sarana sistem produksi
2. Pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber energi baru terbarukan di wilayah pulau-pulau kecil, terutama energi listrik tenaga surya.

c) Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Penanganan kerusakan melalui pemulihan kembali/rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak, pengendalian pencemaran, serta upaya konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

d) Penanganan Perubahan Iklim dan Penyediaan Informasi Iklim dan Informasi Bencana.

1. Mengembangkan komoditas perikanan yang sesuai/tahan terhadap perubahan iklim
2. Menyebarluaskan teknologi inovatif dalam sistem produksi ikan untuk mengatasi perubahan iklim

e) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

1. Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang difokuskan : i) Pengembangan wisata bahari di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, fasilitasi investasi di lokus andalan, ii) Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya, termasuk pengembangan energi laut dan bioteknologi laut di beberapa lokasi terpilih.
2. Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada: i)



Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan sekurang-kurangnya 200.000 orang sampai tahun 2019; ii) Peningkatan IPTEK Kelautan dan diseminasi teknologi; serta iii) Penguatan dan revitalisasi budaya maritim

3. Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir melalui i) peningkatan kapasitas industri kecil melalui penyempurnaan pola kemitraan, pengembangan mata pencaharian alternatif, penumbuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau kecil, dan penguatan peran serta masyarakat pesisir dan kelangsungan hak masyarakat adat dan tradisional dalam menjaga kelestarian.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

B.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dalam Rancangan awal RPJMN 2025- 2029 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan, maka arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
Isu pembangunan global dalam beberapa dekade ke depan antara lain mewujudkan kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan. Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan secara global akan turut memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan pembangunan kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tidak akan dilakukan secara eksplosif dan destruktif, melainkan mengedepankan penerapan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kelestarian lingkungan (*sustainable development*) dan penegakan secara terpadu dan efektif.
- b. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan
- c. Mengembangkan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif yang berkepribadian
- d. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.



B.2. Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas, beberapa strategi yang akan ditempuh adalah :

a. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi:

1) Penerapan manajemen kuota penangkapan.

Sumber daya ikan merupakan yang tidak terbatas, sehingga pembatasan pemanfaatannya perlu menjadi strategi agar perikanan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Manajemen kuota penangkapan merupakan tindakan pengendalian dari sisi *output* kegiatan perikanan (*output control*) dengan menetapkan jumlah ikan yang diperbolehkan untuk ditangkap dan dialokasikan baik untuk nelayan maupun untuk industri. Penerapan jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap turut mempertimbangkan jumlah populasi ikan yang tetap di laut untuk dapat terus berkembang biak, sehingga penerapan strategi ini memberikan dampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan.

2) Perlindungan spesies tertentu

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memberikan keuntungan biodiversitas fauna. Beberapa spesies termasuk dalam spesies akuatik yang dilindungi. Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mendukung kelestarian sumber daya ikan yang terancam punah melalui upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan untuk spesies tertentu sebanyak 20 jenis prioritas.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menertibkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait perlindungan jenis ikan yaitu :

a) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.59/MEN/2011 tentang Penerapan Status Perlindungan Terbatas Jenis Ikan Terubuk (*Tenulosa macrura*),

b) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/KEPMEN.KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhyncodon typus*),



- c) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.37/KEPMEN.KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (*Chellinus undulatus*),
 - d) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.4/KEPMEN.KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Pari Manta (*Manta spp*).
 - e) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.46/KEPMEN.KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan terbatas Bambu Laut (*Isis spp*).
- 3) Pengembangan kawasan ekowisata maritim
- Kegiatan ekowisata maritim atau wisata bahari, sudah berjalan dengan baik di beberapa kawasan pesisir. Namun potensi ekowisata maritim yang masih sangat besar belum tergarap dan dikembangkan secara optimal sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan kawasan ekowisata maritim akan melibatkan Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, pihak dunia usaha/investor serta masyarakat pesisir .
- 4) Pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEE
- Hak menangkap ikan yang diberikan kepada industri maupun nelayan harus disertai dengan kewajiban menangkap ikan dengan cara yang bertanggungjawab. Pemilihan alat tangkap memerlukan kriteria selektif dan ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan habitat maupun sumber daya kelautan dan perikanan lainnya. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan strategi pengaturan alat tangkap ramah lingkungan dan penertiban rumpon di ZEEI untuk mencapai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- 5) Pendugaan stok sumber daya ikan, pemantauan kapasitas penangkapan ikan, pengembangan *observer* di atas kapal, penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), termasuk penyusunan pedoman pengelolaan sumber daya perikanan di daerah (perizinan penangkapan ikan, ukuran dan jenis alat tangkap), dan penguatan statistik perikanan.



Dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan yang bertanggung jawab, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan strategi penguatan statistik perikanan, pemantauan kapasitas penangkapan ikan, dan *stock assesmen* serta pengaturan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) untuk dapat mengetahui lebih akurat kondisi sumber daya perikanan dan menetapkan rencana pengelolaan sumber daya perikanan.

6) Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan organisasi perikanan regional (RFMO)

Posisi Indonesia berdekatan dengan wilayah *spawning ground Southern Bluefin Tuna* (SBIT) yang berada di selatan Jawa dan Bali. Selain itu posisi *Coral Triangel* diduga dekat dengan wilayah *spawning ground* tuna lainnya seperti *yellowfin* tuna dan *Bigeye Tuna* di wilayah pasifik. *Baby Tuna* mencari makan di wilayah perairan yang kaya akan nutrien dan ikan kecil, yaitu di sekitar perairan pantai.

7) Penguatan kerjasama regional dan internasional

Kerjasama regional dan internasional terus digagas dan di galang dalam rangka pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Upaya yang sering dilakukan antara lain melalui Prakarsa Segitiga untuk Terumbu Karang. Perikanan dan Ketahanan Pangan atau *Coral Triangle Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security* (CTI-CFF) untuk melestarikan sumber daya laut dan pesisir di enam Negara di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik dan *MoU Box* dengan Australia.

b. Mengembangkan Kompetensi SDM Dan Iptek Inovatif yang Berkepribadian.

Dilaksanakan dengan strategi :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM KP berbasis kompetensi dan penciptaan SDM baru terampil dan ahli;
- 2) Peningkatan keterampilan masyarakat dalam penerapan iptek dan teknologi tepat guna;
- 3) Pemberian akses pendidikan bagi anak pelaku utama di satuan pendidikan lingkup KKP;
- 4) Penyelenggaraan program pendidikan vokasi bidang KP dengan pendekatan *Teaching Factory*;



- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan pendidikan sebagai pusat rujukan dan lembaga sertifikasi SDM KP;
 - 6) Meningkatkan kerja sama kemitraan dengan para pihak dalam rangka pengkayaan/pemanfaatan sumber belajar, penguatan kelembagaan dan kerja sama untuk peningkatan kapasitas SDM KP;
 - 7) Pengembangan materi uji kompetensi keahlian bidang KP;
 - 8) Pengembangan Pusat Kajian/inovasi teknologi sebagai sumber belajar bagi peserta didik dan masyarakat;
 - 9) Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri;
 - 10) Pengembangan budaya dan wawasan bahari (maritim) melalui pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan, melestarikan nilai budaya, wawasan bahari serta revitalisasi hukum adat dan kearifan lokal terkait dengan tata kelola sumber daya kelautan, dan melindungi dan merevitalisasi peninggalan budaya bawah laut.
- c. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) Transparansi dan modernisasi sistem data dan informasi perikanan (*open government policy*);
 - 2) Penerapan manajemen kinerja melalui penerapan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dan pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja;
 - 3) Integrasi sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja KKP;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan manajemen pengendalian kinerja pelayanan publik;
 - 5) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kelautan dan Perikanan;
 - 6) Penyiapan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
 - 7) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, berbasis kompetensi dan profesionalisme yang berkepribadian;
 - 8) Pengembangan Budaya kerja;



- 9) Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 10) Penerapan sistem pengawasan internal yang profesional dan sinergis;
- 11) Penerapan *e-gouvernement* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern;
- 12) Peningkatan efektifitas implementasi pencegahan dan kebijakan anti korupsi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

B.3. Quickwins dan Program Lanjutan

Quick wins merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

Program *Quick wins* Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dirancang untuk periode antara lain :

1. Pencanangan Pembangunan *Techno Park* berbasis Perikanan Rakyat, melalui : pembangunan *techno park* berbasis pendidikan;
2. Pengembangan kawasan ekowisata maritim melalui partisipasi dalam Pekan Wisata Maritim.

C. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

C.1. Arah Kebijakan Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Nasional 2025 – 2029 Arah Kebijakan Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah :

1. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
2. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kemakmuran masyarakat kelautan dan perikanan;
3. Mengembangkan kompetensi SDM dan IPTEK inovatif yang berkepribadian;
4. Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.



C.2. Strategi Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Untuk pelaksanaan arah kebijakan tersebut di atas, beberapa strategi yang akan ditempuh adalah:

- a) Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Meningkatkan lembaga dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dinamis, dan kompetitif bertaraf internasional sesuai konvensi STCW, CCRF dan Undang-undang yang berlaku menuju Indonesia sebagai poros maritim.
- b) Mengembangkan kompetensi SDM dan Iptek Inovatif yang berkepribadian, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Meningkatkan kualitas penelitian terapan kelautan dan perikanan yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - 2) Meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil;
 - 3) Meningkatkan kualitas/kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- c) Membangun kemandirian pemerintahan guna mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) Melengkapi dan menyempurnakan kualitas/kuantitas sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan sesuai standar internasional;
 - 2) Mengadministrasikan dan mempertahankan manajemen mutu sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta mengaplikasikan manajemen mutu ISO 9001:2008 dan berbudaya pelayanan prima;
 - 3) Menjalankan kebijakan dan tugas – tugas Menteri Kelautan dan Perikanan dan Badan Riset dan Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

D. Kerangka Kelembagaan

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan pendidikan tinggi yang diharapkan memegang posisi terdepan, dan menjadi pelopor pembaharuan serta rujukan dalam disiplin ilmu pada 3 (tiga) bidang keahlian tersebut yang nantinya akan menghasilkan Ahli Madya Perikanan, khususnya di bidang Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan, Ahli Teknik Kapal Penangkap Ikan dan Ahli



Pengolahan Produk Perikanan yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung senantiasa berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran hakiki dan universal, keilmuan, kebebasan mimbar dan kebebasan akademik, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, taat hukum, menghargai kemajemukan dan kemitraan, edukatif, ilmiah, dan religius. Tiga bidang keahlian itu terbagi menjadi 3 program studi yaitu :

- (a). Prodi Teknik Penangkapan Ikan
- (b). Prodi mekanisasi Perikanan
- (c). Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan

Organisasi Politeknik KP Bitung terdiri dari:

Direktur/ Ketua LSP-P1	:	IGP Gede Rumayasa Yudana, S.Pi, M.P
Pembantu Direktur Bidang Akademik	:	Dr. Barokah, S.St.Pi, M.Pd
Pembantu Direktur Bidang Umum	:	Dr. Rudi Saranga, S.Pi, M.Si
Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni	:	Saeful A. Tauladani, S.Pi, M.Si
Kepala Subbag Umum	:	Feronica Umboh, S.E.

Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

1. Perkembangan Jumlah tenaga pengajar

Tabel 2. Perkembangan Tenaga Pengajar

Uraian	2023	2024	2025
Jumlah dosen (orang)	43	39	38
Jumlah taruna (orang)	464	494	477
Rasio dosen : taruna	1 : 11	1 : 13	1 : 13

Jumlah tenaga pengajar fungsional dosen dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena ada yang pensiun, walaupun jumlah tersebut masih memenuhi persyaratan namun institusi tetap berusaha untuk melakukan penambahan dosen untuk mengantisipasi beberapa dosen yang akan pension. Mengingat betapa penting tenaga pengajar bagi keberlangsungan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.



2. Perkembangan Kualifikasi SDM

Secara umum kualifikasi tenaga pengajar pada tahun 2017 adalah 25 orang berkualifikasi S2 dan 1 orang berkualifikasi S3, sedangkan pada tahun 2018 adalah 23 orang dosen berkualifikasi S2 dan 2 orang berkualifikasi S3. Adapun keragaan dosen tahun 2020 dan 2025 tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Perkembangan Kualifikasi SDM Pengajar

Jumlah Dosen														
2021(Orang)			2022 (Orang)			2023(Orang)			2024(Orang)			2025 (Orang)		
S2	S3	Jlh	S2	S3	Jlh			Jlh			Jlh			Jlh
26	2	28	28	2	30									

3. Tenaga Kependidikan

Selain dosen atau tenaga pendidik, unsur sumber daya manusia yang lain dalam lembaga pendidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas pada bidang non pengajaran. Para pegawai dan karyawan juga memiliki peran penting bagi terselenggara dan suksesnya program pendidikan. Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung jumlah tenaga karyawan/administrasi adalah 37 orang tenaga kependidikan yang berstatus sebagai pegawai tetap (Pegawai Negeri Sipil) Para pegawai tersebut memiliki beragam latar belakang pendidikan dari kualifikasi SLTA, S-1. Profil karyawan dengan kualifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tenaga Kependidikan Politeknik KP Bitung

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar (SD)	1	2,7%
2	SMP/SMA Sederajat	14	37,8%
3	Diploma	4	10,8%
4	Strata Satu (S1)	17	46%
5	Strata Dua (S2)	1	2,7%
Jumlah		37	100,00%

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri yang ada di kota Bitung, berupaya untuk melengkapi fasilitas dan sarana pendidikannya, sehingga dapat memenuhi tuntutan *stakeholders* akan



kualitas proses dan layanan pendidikan yang diselenggarakannya. Hingga saat ini fasilitas sarana yang ada di Politeknik KP Bitung antara lain: (1) Laboratorium, (2) Komputer, (3) LCD (*setiap kelas*), (4) Laptop, dan (5) Meubelair.

Adapun prasarana akademik dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

- a. Prasarana bangunan. Prasarana ini mencakup lahan dan bangunan gedung baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti, pusat pelayanan taruna, prasarana olahraga dan seni serta asrama taruna.
- b. Prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan internet, taman, parkir.

Hingga saat ini Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung telah memiliki prasarana dan sarana yang cukup representatif guna menunjang penyelenggaraan proses pendidikan untuk tingkat Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan. Prasarana dan sarana yang ada terus diupayakan pengembangannya baik dalam kuantitas dan kualitas guna mendukung terwujudnya Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul.

Data prasarana yang dimiliki oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berupa ketersediaan lahan dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 5. Data Prasarana Politeknik KP Bitung

No	Uraian	Jumlah	Ket.
1	Tanah Total	182.018 m ²	
2	Ruang Kuliah	10.880 m ²	
3	Ruang Kantor Administrasi	1.800 m ²	
4	Ruang Perpustakaan	700 m ²	
5	Ruang Komputer	200 m ²	
6	Ruang Laboratorium	2.346 m ²	
7	Ruang Dosen Tetap	750 m ²	



5. Kondisi Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas pada unit-unit layanan tertentu. Sementara layanan akademik dan keuangan sudah berbasis layanan aplikasi dengan tujuan *free* akses dan keterbukaan pengelolaan. Dalam pelayanan akademik sudah menggunakan layanan aplikasi SIMDIK sedangkan pelayanan keuangan telah mengikuti standar aturan Kementerian Keuangan.

Jaringan internet pada Politeknik KP Bitung sudah dapat diakses di tiap ruangan kerja dan ada juga fasilitas *hotspot* area. Layanan internet tersebut penggunaannya untuk fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan perkantoran. Ke depannya layanan tersebut dapat menjangkau fasilitasi penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh termasuk asrama taruna.

6. Jalinan Kerja Sama dengan Institusi Lain

Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung mempunyai jaringan alumni yang sudah meluas dan juga memiliki akses bisnis ke dalam dan luar negeri yang merupakan kekuatan penting bagi organisasi. Dengan jaringan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk meraih pangsa pasar dan memperkuat *competitive advantage* yang dikuatkan dengan cara menjalin kerja sama.

Adapun beberapa daftar kerja sama Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Kerja Sama Politeknik KP Bitung Dengan Pihak Lain

No	Mitra Kerja Sama	Jenis	Status	Judul Kerja Sama
1	Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara	Lembaga Pendidikan	Berlaku	Kerja sama Diklat Kepelautan dan Pengembangan SDM
2	FPIK Universitas Sam Ratulangi	Lembaga Pendidikan	Berlaku	Pendidikan, Pelatihan, Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan SDM KP dan Bisnis/Kewirausahaan



3	FPIK Universitas Negeri Gorontalo	Lembaga Pendidikan	Berlaku	Pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma PT untuk mendukung program merdeka belajar kampus merdeka
4	Politeknik Negeri Manado	Lembaga Pendidikan	Berlaku	Pelaksanaan kegiatan Tri-Dharma PT untuk mendukung program merdeka belajar kampus merdeka
5	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Lembaga Pemerintah	Berlaku	Peningkatan kualitas SDM KP
6	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara	Lembaga Pemerintah	Berlaku	Kerja sama di Bidang Pelayanan Hukum
7	SMK 1 Lolak	Lembaga Pendidikan	Berlaku	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM KP
8	PT. Margatama Jaya Bersama	DUDI	Berlaku	Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan SDM KP
9	Program Studi Magister PTK Pascasarjana Universitas Negeri Manado	Lembaga Pendidikan	Berlaku	Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat
10	<i>Association Diving School International Indonesia (ADS- INA)</i>		Berlaku	Pendidikan, Pelatihan dan Tempat Sertifikasi <i>Diving</i>



11	Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara	Lembaga Pemerintah	Sudah ditelaah lagi Proses Penandatanganan	Penyelenggaraan program pengembangan SDM KP
12	Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Moutong	Lembaga Pemerintah	Proses penyusunan PKS	Peningkatan kapasitas SDM KP

Total kerja sama dengan institusi lain sampai akhir tahun 2024 yang tercatat 12 dokumen. Bentuk kerja sama berupa kerja sama pendidikan bagi anak pelaku utama, Serapan lulusan, pengembangan pendidikan berupa penyediaan lokasi praktik taruna, pengembangan penelitian dosen dan lainnya.

7. Produk dan Jasa Yang Dihasilkan

Selama empat tahun terakhir pencapaian produk dan jasa Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang pertama yaitu pendidikan dan pengajaran, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Selama periode 2020-2024, baik mengenai *input* taruna baru maupun *output* taruna yang lulus secara umum mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan adanya penambahan program studi Teknik Pengolahan Produk Perikanan.



Total alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang tercatat sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Jumlah Alumni

TAHUN LULUS	PROGRAM STUDI			JUMLAH
	TPI	MP	TPPP	
2001	33	29		62
2002	37	44		81
2003	49	40		89
2004	42	42		84
2005	36	33		69
2006	36	30		66
2007	36	23		59
2008	71	26		97
2009	35	48		83
2010	33	22		55
2011	60	30		90
2012	61	25		86
2013	37	27		64
2014	66	37		103
2015	67	50		117
2016	54	48		102
2017	61	47	33	141
2018	44	42	40	126
2019	53	29	26	108
2020	56	27	57	140
2021	58	23	55	136
2022	40	33	61	134
2023	53	24	54	131
2024	30	30	74	134
JUMLAH	1148	809	400	2357



b. Bidang Penelitian

Selama periode 2020 s.d. 2024 telah menghasilkan penelitian 61 buah, yang merupakan penelitian atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa penelitian telah dipublikasikan di berbagai media baik cetak maupun elektronik/online.

Publikasi hasil penelitian melalui buletin Matric yang dikelola oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung maupun jurnal nasional dan nasional lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) sebagai bagian unit yang menunjang tridarma perguruan tinggi telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai jeniskegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan penyuluhan, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan. Lokasi kegiatan berada di desa desa pesisir, desa nelayan, yang tertinggal atau membutuhkan pelatihan kelautan dan perikanan. Lokasi pengabdian masyarakat ada juga yang bertempat di pulau terluar wilayah NKRI.

Secara lebih lengkap berikut adalah uraian kegiatan pengabdian masyarakat dari kurun 2020 sd 2024 :

- Tahun 2020 : terlaksana pengabdian 4 kegiatan
- Tahun 2021 : terlaksana pengabdian 3 kegiatan
- Tahun 2022 : terlaksana pengabdian 6 kegiatan
- Tahun 2023 : terlaksana pengabdian 11 kegiatan
- Tahun 2024 : terlaksana pengabdian 17 kegiatan



Tabel 8. Capaian Layanan Pelatihan Politeknik KP Bitung

No	Jenis Pelatihan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	BST	325	1615	1590	1287	750	1320	1020	1223	543	225	88						
2	BST-KLM	0	0	0	0	30	0	0	209	308	110	58						
3	ANKAPIN II	32	70	64	94	36	59	0	49	98	29	31						
4	ATKAPIN II	21	56	29	39	0	18	0	0	18	25	30						
5	ANKAPIN III	0	0	0	14	43	115	47	21	95	0	0						
6	ATKAPIN III	0	0	0	1	14	29	16	9	18	0	0						



Poltek KP Bitung juga telah ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 dan Tempat Uji Kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan begitu, Politeknik KP Bitung memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan uji kompetensi kepada purnawidya atau lulusan pelatihan Politeknik KP Bitung sebelumnya. Kegiatan uji kompetensi ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat setelah diberikan pelatihan.

Pada tabel di bawah ini, *output* kegiatan uji kompetensi mengalami naik dan turun. Perbedaan jumlah tersebut karena beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya perbedaan jadwal melaut antara nelayan satu dan lainnya, penyebaran informasi pelaksanaan diklat yang belum menjangkau semua pihak dan perbedaan jumlah taruna yang mengikuti pelatihan.

Tabel 9. Layanan Uji Kompetensi Politeknik KP Bitung 2016-2018

No	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
1	Uji Kompetensi		0	100					

Aspek Administrasi

Aspek administrasi yang diukur adalah pembukaan program studi baru dan akreditasi program studi.

1. Program Studi

Secara terus menerus Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung berusaha meningkatkan kualitas terutama dari sisi pendidikan. Salah satunya adalah dengan menambah program studi baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat. Prodi yang ada adalah : (a). Prodi Teknik Penangkapan Ikan/TPI, (b). Prodi Mekanisasi Perikanan/MP, (c). Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan/TPPP. Prodi terbaru adalah Prodi TPPP. Ada kemungkinan untuk membuka prodi baru yaitu Bangunan Kapal serta Pariwisata Bahari.



2. Akreditasi Program Studi

Sampai dengan tahun 2025 terdapat 3 program studi mendapatkan akreditasi semua.

Tabel 10. Akreditasi Program Studi Politeknik KP Bitung

No	Program Studi	Akreditasi
1	TPI	A
2	MP	Baik Sekali
3	TPPP	Baik Sekali



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis diukur menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP yang ingin dicapai menggunakan Indikator kinerja kegiatan sebagai alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa keluaran (*output*) yang dibiayai oleh anggaran (*input*). Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara *specific, measurable, achievable, reliable, and timebond (smart)*.

Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit kerja lingkup BPPSDM dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 11. Rancangan Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025-2029

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten	Peserta pendidikan kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (Orang)	126	153	127	129	153
			Jumlah lulusan Politeknik KP Bitung (Orang)	148				
			Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang kompeten (Orang)	495				
			Nilai PNBP satker Politeknik KP Bitung (Rp. Miliar)	0,474				
			Kerjasama Politeknik KP Bitung yang disepakati (Kesepakatan)	2				



			Persentase lulusan Politeknik KP Bitung yang besertifikasi kompetensi (%)	100				
			Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di Politeknik KP Bitung (%)	100				
		Tersedianya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pendidikan tinggi kelautan dan perikanan	Kajian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (Paket)	3				
			Pengabdian pendidikan tinggi kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung (kelompok)	1				
		Terselenggaranya tata kelola pendidikan kelautan dan perikanan	Kelembagaan publik pendidikan kelautan dan perikanan yang terakreditasi pada Politeknik KP Bitung (Lembaga)	1				
			Tenaga pendidik kelautan dan perikanan Politeknik KP Bitung yang tersertifikasi (Orang)	35				
2	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPSDMKP	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Bitung (%)	85	85	85	85	85
			Penilaian Mandiri SAKIP Politeknik KP Bitung (Nilai)	81	81.5	82	82.5	83
			Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Bitung (Indeks)	84	85	86	87	88
			Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Politeknik KP Bitung (%)	80	80	80	80	80
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Politeknik KP Bitung (%)	80	80	80	80	80
			Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	92	92	92	92	92



			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Politeknik KP Bitung (Nilai)	71,5	71,5	71,5	71,5	71,5
			Persentase Dukungan Manajemen Teknis dan Kegiatan Strategis Lingkup Politeknik KP Bitung (%)	100	100	100	100	100

B. Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



BAB V

PENUTUP

Rancangan Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 2025 -2029 yang merupakan turunan dari Rancangan Strategi unit eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan selanjutnya diturunkan lagi dalam Rancangan Strategis unit eselon II Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, dan merupakan juga dokumen yang disusun untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029.

Rancangan Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 2025 – 2029 yang masih menunggu Rencana Strategis KKP dan turunannya ke unit eselon I dan II yang akan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan paling lambat 3 bulan setelah diterbitkannya Peraturan tentang RPJMN 2025 – 2029.

Sangat disadari masih banyak kekurangan dalam rancangan ini, saran dan masukan sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen Rencana Strategis Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun 2025 – 2029 melalui kegiatan *review* Renstra pada setiap tahunnya, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan program kegiatan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung 5 (lima) tahun mendatang.